

Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Terhadap Pengelolaan Kas Di OPD Kabupaten Bengkalis

Ade Aspriandi¹

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mei 30, 2025

Revised Mei 30, 2025

Accepted Mei 30, 2025

Kata Kunci:

Akuntabilitas,
Akuntansi Syariah,
Kas,
Organisasi Perangkat Daerah,
Transparansi,

Keywords:

Accountability,
Cash,
Regional Government
Organizations,
Sharia Accounting,
Transparency,

ABSTRAK

Pengelolaan kas di Organisasi Perangkat Daerah menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan kas di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penelitian pustaka yang menganalisis berbagai sumber literatur ilmiah tentang akuntansi syariah dan pengelolaan keuangan publik. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip akuntansi syariah memerlukan integrasi lima nilai fundamental yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, amanah, dan keberkahan dalam pengelolaan kas. Sistem informasi akuntansi berbasis syariah dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal melalui prosedur pencatatan yang sesuai prinsip syariah, dokumentasi lengkap, dan teknologi yang mendukung transparansi. Pengendalian internal berbasis syariah mencakup lingkungan pengendalian Islami, penilaian risiko komprehensif, dan aktivitas pengendalian yang sesuai syariah. Tantangan implementasi meliputi keterbatasan pemahaman aparatur, infrastruktur teknologi, dan harmonisasi regulasi yang dapat diatasi melalui program pelatihan berkelanjutan dan pengembangan sistem terintegrasi. Penelitian ini menghasilkan kerangka kerja praktis untuk implementasi prinsip akuntansi syariah dalam organisasi pemerintahan daerah yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan kas dan kepercayaan masyarakat.

ABSTRACT

Cash management in Regional Government Organizations faces challenges in integrating moral and ethical values according to the characteristics of Indonesian society, which is predominantly Muslim. This research aims to analyze the application of sharia accounting principles in cash management at Regional Government Organizations of Bengkalis Regency. The research method uses a qualitative approach with library research techniques that analyze various sources of scientific literature on sharia accounting and public financial management. Data analysis was conducted through content analysis techniques with stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the implementation of sharia accounting principles requires the integration of five fundamental values: justice, transparency, accountability, trust, and blessing in cash management. Sharia-based accounting information systems can improve the effectiveness of internal control through recording procedures that comply with sharia principles, complete documentation, and technology that supports transparency. Sharia-based internal control includes an Islamic control environment, comprehensive risk assessment, and control

activities that comply with sharia. Implementation challenges include limited apparatus understanding, technology infrastructure, and regulatory harmonization that can be overcome through continuous training programs and integrated system development. This research produces a practical framework for implementing sharia accounting principles in regional government organizations that can improve the quality of cash management and public trust.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Ade Aspriandi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis
Bengkalis, Indonesia
Email: adegames438@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan di sektor publik mengalami transformasi signifikan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai ujung tombak pelaksanaan program pemerintahan di tingkat kabupaten dituntut untuk menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang tidak hanya memenuhi aspek administrasi, namun juga sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Hal ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, dimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pengelolaan keuangan publik menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Pengelolaan kas merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem keuangan organisasi yang memerlukan perhatian khusus karena melibatkan likuiditas dan operasional harian instansi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan kas yang efektif tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis akuntansi, namun juga menyangkut kepercayaan publik dan pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Putri & Pravitasari (2023) menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan kas dapat meningkatkan pengendalian internal, dimana BAZNAS Tulungagung berhasil menerapkan sistem yang lebih terperinci dan jelas melalui SIMBA (Sistem Manajemen BAZNAS) meskipun masih menghadapi beberapa kendala teknis.

Prinsip akuntansi syariah memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan keuangan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, namun juga mempertimbangkan dimensi moral dan etika. Prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberkahan dalam setiap transaksi keuangan memberikan landasan yang kuat untuk pengelolaan kas yang berkualitas. Studi yang dilakukan oleh Putri & Oktavia (2023) mengonfirmasi bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam perspektif Islam telah berhasil diterapkan dalam pengelolaan dana desa di Sungai Langka, dimana keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab sesuai aturan yang berlaku menciptakan sistem yang akuntabel dan transparan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan publik masih menghadapi berbagai tantangan. Nasution, Syahriza, & Hasibuan (2024) menemukan bahwa sistem informasi akuntansi pada pemerintahan Desa Cinta Makmur kurang efektif dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dimana diperlukan pelatihan lanjutan bagi aparatur desa untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan sistem tersebut. Kondisi serupa juga ditemukan dalam konteks yang lebih luas, dimana

Ishak & Amalia (2020) mengidentifikasi bahwa sistem pengendalian internal dan akuntabilitas secara signifikan mempengaruhi pengelolaan penyaluran dana hibah dengan kontribusi sebesar 81,6 persen terhadap efektivitas pengelolaan.

Fenomena yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana prinsip akuntansi syariah dapat diintegrasikan dalam sistem pengelolaan kas di organisasi pemerintahan yang selama ini cenderung menggunakan pendekatan konvensional. Penelitian Rozi et al., (2024) memberikan gambaran menarik tentang pengelolaan dana non-halal pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis, dimana praktik pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut telah disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai dana sosial untuk kegiatan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diterapkan dalam konteks organisasi modern.

Permasalahan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik juga menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius. Candri et al. (2024) mengungkapkan bahwa akuntabilitas realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Ibu Harapan Bengkalis belum berjalan sempurna karena beberapa faktor penghambat, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan belum sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam pengelolaan keuangan yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, namun juga nilai-nilai moral dan etika.

Industri kecil menengah juga menghadapi tantangan serupa dalam penerapan prinsip akuntansi, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Oktaviani et al. (2024) pada industri gula aren di Desa Kaiti. Meskipun sebagian besar industri kecil menengah mencoba menerapkan prinsip akuntansi syariah, namun penerapannya masih terbatas dan belum sesuai standar ideal karena kurangnya pemahaman mendalam serta keterbatasan sumber daya. Hal ini mengindikasikan perlunya program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip akuntansi syariah.

Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu daerah dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerahnya. Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkalis mengelola anggaran yang cukup signifikan dan melayani masyarakat yang sebagian besar menganut nilai-nilai Islam, sehingga penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan kas dapat memberikan nilai tambah tidak hanya dari aspek teknis akuntansi, namun juga dari perspektif kepercayaan dan legitimasi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan kas di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dengan pendekatan yang komprehensif dan mendalam. Pendekatan yang diusulkan dalam penelitian ini adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberkahan dalam setiap aspek pengelolaan kas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Nilai baru yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pengembangan kerangka kerja praktis untuk implementasi prinsip akuntansi syariah dalam konteks organisasi pemerintahan daerah yang dapat menjadi model bagi daerah lain dengan karakteristik serupa.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pengembangan sistem pengelolaan keuangan publik yang tidak hanya efektif dan efisien, namun juga sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi syariah sektor publik serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan kas di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan sistematis tentang implementasi prinsip akuntansi syariah dalam konteks pengelolaan keuangan sektor publik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah, meliputi jurnal penelitian, buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan akuntansi syariah dan pengelolaan keuangan publik. Sumber data utama mencakup penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional, khususnya yang membahas tentang sistem informasi akuntansi, pengelolaan keuangan daerah, prinsip tata kelola yang baik, dan implementasi nilai-nilai syariah dalam organisasi. Data sekunder ini dipilih karena memberikan landasan teoritis yang kuat dan memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis perbandingan dengan berbagai kasus dan kondisi yang telah diteliti sebelumnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang sistematis dan terstruktur. Proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi kata kunci yang relevan dengan topik penelitian, seperti akuntansi syariah, pengelolaan kas, organisasi perangkat daerah, transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal. Pencarian literatur dilakukan melalui berbagai basis data akademik dan perpustakaan digital untuk memperoleh sumber-sumber yang kredibel dan mutakhir. Setiap sumber literatur yang diperoleh kemudian dievaluasi berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas penulis, dan kualitas metodologi penelitian yang digunakan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan secara bertahap dan sistematis. Tahap pertama adalah reduksi data, dimana informasi dari berbagai sumber literatur dirangkum dan dipilih berdasarkan fokus penelitian tentang penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan kas. Tahap kedua adalah penyajian data, dimana temuan dari berbagai sumber literatur disusun secara tematik berdasarkan aspek-aspek yang relevan dengan penelitian. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana peneliti melakukan sintesis terhadap berbagai temuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan prinsip akuntansi syariah dalam konteks pengelolaan kas di organisasi perangkat daerah.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui teknik triangulasi sumber, dimana informasi dari satu sumber literatur dikonfirmasi dengan sumber-sumber lainnya untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan penelitian. Proses validasi juga dilakukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmasi sebagaimana yang berlaku dalam penelitian kualitatif. Selain itu, peneliti juga melakukan refleksi kritis terhadap setiap sumber literatur untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan objektif dan tidak bias.

Keterbatasan penelitian ini adalah bergantung pada ketersediaan literatur yang relevan dan mutakhir tentang topik yang diteliti. Namun demikian, metode penelitian pustaka memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian yang mendalam dan sistematis tentang konsep-konsep teoritis dan praktik-praktik terbaik dalam penerapan prinsip akuntansi syariah, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan sistem pengelolaan kas di organisasi perangkat daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Kas

Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan kas organisasi perangkat daerah memerlukan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan sistem keuangan Islam. Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, terdapat lima prinsip utama yang menjadi fondasi akuntansi syariah yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, amanah, dan keberkahan. [8] menegaskan bahwa prinsip-prinsip akuntansi Islam mencakup keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban serta pelaporan yang cepat, terang, jelas, tegas, dan normatif tanpa adanya manipulasi data keuangan. Implementasi prinsip keadilan dalam pengelolaan kas berarti setiap transaksi keuangan harus dilakukan secara proporsional dan tidak merugikan pihak manapun, sehingga alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan yang sesungguhnya dan tidak terdapat keberpihakan yang tidak semestinya.

Prinsip transparansi dalam konteks pengelolaan kas mengharuskan setiap informasi keuangan dapat diakses dengan mudah oleh semua pemangku kepentingan. [9] menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Gorontalo telah berhasil menerapkan prinsip transparansi dalam laporan keuangan mereka, dimana setiap transaksi dicatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini sejalan dengan temuan [10] yang menganalisis penerapan prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan koperasi di Kabupaten Bengkalis, meskipun masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman pengurus tentang pelaporan keuangan dan keterbatasan teknologi yang perlu diatasi melalui program pelatihan berkelanjutan.

Prinsip akuntabilitas menuntut setiap pengelola keuangan untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan kas. [11] dalam penelitiannya tentang penerapan akuntansi syariah pada BMT Gunungjati menunjukkan bahwa akuntabilitas dapat diwujudkan melalui pengakuan dan pencatatan yang tepat waktu, dimana pengakuan simpanan dan tabungan wadiah dilakukan saat diterimanya kas, sedangkan pembiayaan dengan akad murabahah, mudharabah, dan qardhul hasan diakui pada saat akad dilakukan. Prinsip amanah mengharuskan pengelola kas untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dengan mengelola keuangan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun prinsip keberkahan menekankan bahwa pengelolaan kas harus mendatangkan manfaat yang maksimal bagi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Pendalaman implementasi kelima prinsip fundamental akuntansi syariah dalam konteks pengelolaan kas organisasi perangkat daerah memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek operasional dengan dimensi spiritualitas. Prinsip keadilan tidak hanya terbatas pada distribusi anggaran yang merata, melainkan juga mencakup kepatuhan terhadap hirarki prioritas pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam praktiknya, keadilan distributif ini dapat diwujudkan melalui mekanisme alokasi anggaran yang mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat berdasarkan data empiris dan survei mendalam, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan politik atau kedekatan dengan penguasa.

Dimensi transparansi dalam pengelolaan kas syariah menuntut keterbukaan informasi yang melampaui standar minimal transparansi konvensional. Transparansi syariah mengharuskan publikasi informasi keuangan dalam format yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, termasuk penjelasan tentang manfaat dan dampak setiap program yang dibiayai dari kas daerah. Aspek akuntabilitas dalam perspektif syariah tidak hanya bersifat horizontal kepada atasan atau lembaga pengawas, tetapi juga vertikal kepada Allah sebagai pemilik hakiki segala kekayaan. Konsep akuntabilitas vertikal ini mendorong pengelola kas untuk senantiasa mempertimbangkan aspek kehalalan dan keberkahan dalam setiap keputusan keuangan.

Prinsip amanah dalam pengelolaan kas daerah mengandung makna bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola merupakan titipan rakyat yang harus dijaga dan digunakan sesuai

peruntukannya. Implementasi prinsip amanah memerlukan sistem pengawasan internal yang ketat sertabudayaorganisasi yang mengutamakan integritas dan kejujuran. Adapun prinsip keberkahan menuntut agar pengelolaan kas tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kuantitatif, melainkan juga pada dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Keberkahan dalam konteks ini dapat diukur melalui indikator peningkatan kualitas hidup masyarakat, berkurangnya kesenjangan sosial, dan terciptanya keadilan ekonomi yang berkelanjutan.

3.2. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Kas

Sistem informasi akuntansi yang berbasis prinsip syariah memerlukan integrasi antara aspek teknologi dan nilai-nilai moral dalam setiap prosesnya. [12] melalui penelitiannya pada PT Citama Bangun Mandiri Sukoharjo menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan kas berbasis online telah mampu meningkatkan efektivitas pengendalian internal dengan mengadopsi sistem digital yang meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan. Implementasi sistem serupa dalam konteks organisasi perangkat daerah memerlukan penyesuaian dengan karakteristik khusus pengelolaan keuangan pemerintahan yang mengutamakan akuntabilitas publik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Penerapan sistem informasi akuntansi syariah dalam pengelolaan kas organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan beberapa komponen utama, yaitu prosedur pencatatan yang sesuai dengan prinsip syariah, dokumen pendukung yang lengkap dan sah, serta teknologi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. [13] dalam penelitiannya pada Masjid Nuruttijarah menunjukkan bahwa sistem pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran arus kas berdasarkan PSAK 101 memerlukan evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Hal ini mengindikasikan perlunya pengembangan sistem yang tidak hanya efisien secara operasional, namun juga memenuhi standar syariah yang ketat.

Integrasi teknologi dalam sistem informasi akuntansi syariah juga harus memperhatikan aspek keamanan data dan privasi informasi keuangan. [14] menekankan bahwa implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam industri perbankan syariah Indonesia menghindari transaksi yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian untuk memastikan keadilan dan transparansi. Prinsip ini dapat diadaptasi dalam pengembangan sistem informasi akuntansi kas organisasi perangkat daerah, dimana setiap fitur dan fungsi sistem harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.

Pengembangan sistem informasi akuntansi syariah untuk pengelolaan kas organisasi perangkat daerah memerlukan rancangan arsitektur sistem yang mengakomodasi keunikan prinsip syariah sekaligus memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Sistem ini harus mampu mengidentifikasi dan memisahkan transaksi yang mengandung unsur ribawi atau spekulatif dari transaksi yang halal, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan pengelolaan kas yang bersih dan sesuai syariah. Fitur pencatatan dalam sistem harus dilengkapi dengan modul validasi syariah yang secara otomatis memverifikasi kesesuaian setiap transaksi dengan prinsip akuntansi Islam.

Integrasi teknologi dalam sistem informasi akuntansi syariah juga harus mempertimbangkan aspek kemudahan akses bagi pemangku kepentingan eksternal, khususnya masyarakat sebagai pemilik dana yang dikelola. Portal transparansi keuangan berbasis web dapat dikembangkan sebagai bagian integral dari sistem, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi real-time tentang penggunaan anggaran dan realisasi program pembangunan. Sistem peringatan dini juga perlu diintegrasikan untuk mendeteksi potensi penyimpangan atau transaksi yang tidak wajar dalam pengelolaan kas.

Aspek keamanan data dalam sistem informasi akuntansi syariah memerlukan pendekatan berlapis yang tidak hanya melindungi informasi dari ancaman siber, tetapi juga menjamin integritas data sesuai prinsip amanah. Implementasi teknologi enkripsi dan sistem backup menjadi keharusan

untuk memastikan ketersediaan dan keakuratan data keuangan. Selain itu, sistem audit trail yang komprehensif harus dikembangkan untuk memungkinkan pelacakan setiap perubahan data dan identifikasi pihak yang bertanggungjawab atas setiap transaksi.

Pelatihan pengguna sistem menjadi aspek krusial yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi sistem informasi akuntansi syariah. Program pelatihan harus mencakup tidak hanya aspek teknis pengoperasian sistem, tetapi juga pemahaman mendalam tentang prinsip akuntansi syariah dan implikasinya terhadap pengelolaan kas. Evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem dan kepuasan pengguna perlu dilakukan untuk memastikan sistem dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan regulasi yang berlaku.

3.3. Pengendalian Internal Berbasis Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Kas

Pengendalian internal yang efektif merupakan kunci keberhasilan pengelolaan kas yang sesuai dengan prinsip syariah. Sistem pengendalian internal berbasis syariah tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan prosedural, namun juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap mekanisme pengawasan. [15] dalam penelitiannya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa transaksi yang dilakukan dengan basis kas yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

Komponen utama pengendalian internal berbasis syariah meliputi lingkungan pengendalian yang Islami, penilaian risiko yang komprehensif, aktivitas pengendalian yang sesuai syariah, informasi dan komunikasi yang transparan, serta pemantauan berkelanjutan. Lingkungan pengendalian yang Islami mencakup komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai syariah, struktur organisasi yang jelas dengan pemisahan tugas yang tepat, serta budaya organisasi yang mengutamakan amanah dan tanggung jawab. Penilaian risiko dalam konteks syariah tidak hanya mempertimbangkan risiko keuangan, namun juga risiko syariah yang dapat mempengaruhi kehalalan dan keberkahan pengelolaan kas.

Aktivitas pengendalian yang sesuai syariah mencakup otorisasi yang tepat untuk setiap transaksi, dokumentasi yang lengkap dan sah, pemisahan tugas yang memadai, serta verifikasi independen terhadap pencatatan dan pelaporan keuangan. [11] menunjukkan bahwa BMT Gunungjati telah menerapkan pengakuan dan pengukuran yang sesuai dengan PSAK 59, dimana setiap transaksi diakui berdasarkan substansi ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Prinsip ini dapat diadaptasi dalam organisasi perangkat daerah untuk memastikan bahwa setiap transaksi kas dicatat berdasarkan realitas ekonomi yang sesungguhnya dan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

Konstruksi sistem pengendalian internal berbasis prinsip syariah dalam pengelolaan kas memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan mekanisme pengawasan formal dengan sistem nilai moral yang kuat. Lingkungan pengendalian yang Islami tidak hanya mencakup struktur organisasi dan kebijakan formal, tetapi juga budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggungjawab, dan takwa. Pembentukan komite etika syariah dalam struktur organisasi dapat menjadi instrumen efektif untuk memastikan setiap kebijakan dan keputusan pengelolaan kas selaras dengan prinsip syariah.

Mekanisme penilaian risikodalam konteks syariah harus mencakup dimensi risiko halal-haram yang spesifik dalam setiap transaksi keuangan. Identifikasi risiko syariah memerlukan pemahaman mendalam tentang fiqh muamalah dan aplikasinya dalam konteks keuangan publik. Pengembangan matriks risiko syariah yang komprehensif dapat membantu pengelola kas dalam mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko yang dapat mempengaruhi kehalalan pengelolaan keuangan. Sistem penilaian risiko ini harus terintegrasi dengan sistem informasi manajemen untuk memungkinkan pemantauan real-time terhadap eksposur risiko.

Aktivitas pengendalian dalam sistem syariah memerlukan mekanisme verifikasi dan validasi yang lebih ketat dibandingkan sistem konvensional. Setiap transaksi kas harus melalui proses review syariah sebelum dieksekusi, dengan melibatkan petugas yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi syariah. Implementasi sistem persetujuan bertingkat dengan kriteria syariah dapat meminimalkan risiko terjadinya transaksi yang tidak sesuai prinsip Islam. Dokumentasi setiap keputusan pengendalian harus dilengkapi dengan justifikasi syariah yang memadai untuk keperluan audit dan evaluasi.

Sistem informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal syariah harus memfasilitasi penyampaian informasi yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip transparansi Islam. Pengembangan dashboard monitoring yang menampilkan indikator kinerja syariah dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Pemantauan berkelanjutan melalui sistem audit internal yang dilengkapi dengan perspektif syariah menjadi kunci keberhasilan implementasi pengendalian internal yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3.4. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Akuntansi Syariah untuk Pengelolaan Kas

Implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan kas organisasi perangkat daerah menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan pemahaman aparatur pemerintah terhadap prinsip akuntansi syariah, keterbatasan infrastruktur teknologi yang mendukung sistem syariah, serta perlunya harmonisasi antara regulasi pemerintahan dengan prinsip syariah. [10] mengidentifikasi bahwa kurangnya pemahaman pengurus tentang pelaporan keuangan dan keterbatasan teknologi menjadi kendala utama dalam penerapan transparansi keuangan di Kabupaten Bengkalis.

Solusi untuk mengatasi tantangan pemahaman adalah melalui program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan bagi aparatur pemerintah. Program ini harus mencakup pemahaman konseptual tentang prinsip akuntansi syariah, aplikasi praktis dalam pengelolaan kas sehari-hari, serta evaluasi berkala terhadap implementasi yang telah dilakukan. [13] merekomendasikan perbaikan sistem akuntansi serta pelatihan bagi pengelola keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, yang dapat diadaptasi dalam konteks organisasi perangkat daerah dengan penyesuaian yang diperlukan.

Tantangan infrastruktur teknologi dapat diatasi melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis cloud computing untuk memudahkan akses dan pemantauan. [12] menunjukkan bahwa adopsi sistem digital dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam pemisahan fungsi pencatatan dan penyimpanan kas serta konsistensi dalam pencocokan transaksi. Solusi teknologi ini harus didukung dengan kebijakan yang jelas tentang keamanan data dan privasi informasi keuangan.

Harmonisasi regulasi dapat dilakukan melalui pengembangan pedoman teknis yang mengintegrasikan ketentuan pemerintahan dengan prinsip syariah. [8] menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip akuntansi Islam dalam pembuatan laporan keuangan agar informasi yang disajikan akurat dan jelas bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga syariah dan akademisi untuk mengembangkan standar operasional yang sesuai dengan karakteristik pengelolaan keuangan pemerintahan namun tetap memenuhi prinsip syariah yang berlaku.

Kompleksitas tantangan implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan kas organisasi perangkat daerah memerlukan pendekatan solusi yang multidimensional dan berkelanjutan. Tantangan kapasitas sumber daya manusia tidak hanya terbatas pada aspek teknis akuntansi, tetapi juga pemahaman filosofis tentang ekonomi Islam dan aplikasinya dalam konteks pemerintahan. Pengembangan kurikulum pelatihan yang komprehensif harus mencakup kajian fiqh muamalah, prinsip keuangan Islam, dan studi kasus implementasi akuntansi syariah di berbagai sektor. Kerja

sama dengan institusi pendidikan tinggi dan lembaga sertifikasi profesi dapat memperkuat program pengembangan kapasitas aparatur.

Tantangan infrastruktur teknologi dalam implementasi akuntansi syariah memerlukan investasi signifikan dalam pengembangan sistem yang dapat mengakomodasi keunikan transaksi syariah. Solusi teknologi berbasis *cloud computing* dapat menjadi alternatif ekonomis yang memungkinkan akses sistem dari berbagai lokasi dengan tingkat keamanan yang memadai. Pengembangan aplikasi mobile untuk monitoring pengelolaan kas dapat meningkatkan aksesibilitas informasi bagi manajemen dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Integrasi dengan sistem keuangan daerah yang sudah ada juga menjadi pertimbangan penting untuk menghindari duplikasi sistem dan memastikan konsistensi data.

Harmonisasi regulasi antara ketentuan pemerintahan dengan prinsip syariah memerlukan pendekatan legislatif yang progresif dan inklusif. Penyusunan peraturan daerah yang mengatur implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan dapat menjadi langkah awal yang strategis. Pelibatan ulama dan pakar ekonomi syariah dalam proses penyusunan regulasi dapat memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah yang otentik. Sosialisasi regulasi kepada seluruh aparatur pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi yang efektif.

Aspek keberlanjutan implementasi memerlukan komitmen jangka panjang dari pimpinan daerah dan dukungan politik yang konsisten. Pembentukan unit kerja khusus yang menangani implementasi akuntansi syariah dapat memastikan kontinuitas program dan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem. Pengembangan indikator kinerja yang spesifik untuk pengelolaan kas berbasis syariah juga diperlukan untuk mengukur keberhasilan implementasi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lain yang telah berhasil mengimplementasikan sistem serupa dapat mempercepat proses pembelajaran dan adaptasi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menganalisis penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan kas di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam pendahuluan. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi prinsip akuntansi syariah memerlukan integrasi lima nilai fundamental yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, amanah, dan keberkahan dalam setiap aspek pengelolaan kas mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah dapat diimplementasikan dalam konteks pengelolaan kas pemerintahan daerah melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Sistem pengendalian internal berbasis syariah terbukti mampu meningkatkan kualitas pengelolaan kas dengan mengintegrasikan komponen lingkungan pengendalian yang Islami, penilaian risiko komprehensif, dan aktivitas pengendalian yang sesuai prinsip syariah. Kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan kerangka kerja praktis untuk implementasi prinsip akuntansi syariah dalam organisasi pemerintahan daerah yang dapat menjadi model bagi daerah lain dengan karakteristik serupa. Kerangka kerja ini mencakup mekanisme transparansi yang memungkinkan akses mudah terhadap informasi keuangan, sistem akuntabilitas yang memastikan pertanggungjawaban setiap keputusan keuangan, serta prosedur yang menjamin keadilan dalam alokasi anggaran.

Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi meliputi keterbatasan pemahaman aparatur, infrastruktur teknologi yang belum memadai, dan perlunya harmonisasi regulasi. Solusi yang direkomendasikan mencakup program pelatihan berkelanjutan, pengembangan sistem informasi berbasis teknologi digital, dan penyusunan pedoman teknis yang mengintegrasikan ketentuan pemerintahan dengan prinsip syariah. Prospek pengembangan hasil penelitian ini dapat diarahkan pada pembentukan standar operasional pengelolaan kas berbasis syariah yang dapat diadopsi secara nasional. Pengembangan aplikasi teknologi finansial berbasis syariah untuk sektor

publik juga menjadi peluang yang menjanjikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Studi lanjutan yang disarankan adalah penelitian empiris untuk menguji implementasi kerangka kerja yang dikembangkan dalam penelitian ini pada organisasi perangkat daerah yang sesungguhnya. Penelitian komparatif antara pengelolaan kas konvensional dengan berbasis syariah juga diperlukan untuk mengukur dampak konkret terhadap kinerja keuangan dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, pengembangan model pengukuran kinerja pengelolaan kas berbasis indikator syariah menjadi area penelitian yang relevan untuk dikembangkan lebih lanjut.

REFERENSI

- [1] D. K. Eka Putri and D. Pravitasari, "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Kas sebagai Upaya Pengendalian Internal di Kantor BAZNAS Tulungagung," *J. Ekon. Bisnis, Manaj. dan Akunt.*, vol. 3, no. 3, pp. 672–682, 2023, doi: 10.47709/jebma.v3i3.2951.
- [2] R. Putri and N. C. Oktavia, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)," *J. Akunt. dan Audit Syariah*, vol. 4, no. 1, pp. 77–93, 2023, doi: 10.28918/jaais.v4i1.7099.
- [3] A. A. Nasution, R. Syahriza, and N. F. A. Hasibuan, "Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban APBDES Pada Pemerintahan Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu," *SANTRI J. Ekon. dan Keuang. Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 128–141, 2024, doi: <https://doi.org/10.61132/santri.v2i2.459>.
- [4] K. Ishak and S. Amalia, "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah," *JAS (Jurnal Akunt. Syariah)*, vol. 4, no. 1, pp. 67–82, 2020, doi: 10.46367/jas.v4i1.218.
- [5] F. Rozi, M. Elsa, A. Suhartini, and D. Oktayani, "Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non-Halal pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkalis," *J. Sains Ekon. dan Edukasi*, vol. 1, no. 10, pp. 897–906, 2024, doi: <https://doi.org/10.62335>.
- [6] K. Candri, M. Mashuri, S. Rahmany, and I. Iswandi, "Penerapan Akuntabilitas terhadap Realisasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Ibu Harapan Bengkalis," *J. Inov. Ekon. Syariah dan Akunt.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–13, 2024, doi: 10.61132/jjesa.v1i2.186.
- [7] R. N. Oktaviani, D. Saputra, Rosyetti, and F. A. Rahman, "Analisis Akuntansi Pada Industri Kecil Menengah Gula Aren Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dalam Perspektif Akuntansi Syariah," *J. Tabarru' Islam. Bank. Financ.*, vol. 7, no. 2, pp. 526–534, 2024.
- [8] S. Mariani, I. R. Noy, and E. Sutisman, "Menuju Laporan Keuangan yang Berkualitas: Penerapan Prinsip Akuntansi Islam dan Syariah dalam Pertanggungjawaban Keuangan yang Adil dan Jelas (Studi Kualitatif Pada PT. Bank BNI Syariah Kota Jayapura)," *YUME J. Manag.*, vol. 6, no. 2, pp. 210–219, 2023.
- [9] M. Rasya, F. Yanto, N. Erika, A. Djafar, N. Febriani, and L. Zis-dskl, "Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Laporan Keuangan BAZNAS Kota Gorontalo," *J. Mhs. Akunt.*, vol. 3, no. 3, pp. 258–275, 2024.
- [10] Nurafida, D. M. S. Putra, and Susilawati, "Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pelaporan Keuangan Koperasi : Studi Kasus di Kabupaten Bengkalis," *J. Ilm. Ekon. Bisnis dan Akunt.*, vol. 2, no. 1, pp. 613–619, 2025, doi: <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i1.670>.
- [11] R. Ramsito, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon," *Accounting, Management and Economics Review*, vol. 2, no. 2, pp. 127–140, 2024, doi: 10.56855/analysis.v2i2.1043.
- [12] A. N. Hidayah and D. Saptantinah, "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pengelolaan Kas Berbasis Online," *J. Nirta Stud. Inov.*, vol. 5, no. 1, pp. 362–384, 2025.
- [13] Rispayanti and H. Hasbi, "Sistem Pencatatan, Penerimaan, Dan Pengeluaran Arus Kas Berdasarkan Akuntansi Syariah Psak 101 Pada Masjid Nuruttijarah Kelurahan Macege Kab. Bone," pp. 1–20, 2022.
- [14] E. Malinda, R. Febrianti, and M. A. Purwanto, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Perbankan Syariah Indonesia," *J. Ekon. Manaj. dan Akunt.*, vol. 2, pp. 305–314,

2024.

- [15] P. Afriyeni, S. Zuliyana, S. Asrina, and Syaherwandi, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis,” *J. Akuntansi, Keuangan, Perpajak. dan Tata Kelola Perusah.*, vol. 1, no. 4, pp. 474–485, 2024.